

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR, DAN PROPOSISI**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Untuk memperkuat penelitian ini, peneliti menyajikan penelitian terdahulu sebagai perbandingan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu dengan tema yang sama, penelitian terdahulu juga memiliki posisi yang penting dalam sebuah penelitian oleh karena itu peneliti menyajikan uraian secara singkat tentang penelitian terdahulu.

##### **2.1.1 Kajian Penelitian Terdahulu**

Pada dasarnya, hasil penelitian seorang peneliti bukan lah satu pertemuan baru yang berdiri sendiri melainkan sesuatu yang bertautan dengan hasil penelitian sebelumnya. Oleh karena itu. Peneliti menyajikan penelitian terdahulu untuk membagikan gambar garis depan (*front line*) pengetahuan yang mendasari penelitian dan untuk memperkuat penelitian sedang di lakukan. Berikut uraian singkat jurnal penelitian terdahulu.

Ariya Akbariyan, dalam penelitian skripsinya yang berjudul “ Program Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis Melalui Pendidikan Kecakapan Hidup di Panti Sosial Bina Karya Yogyakarta”. Penelitian ini mengangkat terkait perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, Pemberdayaan gelandangan dan pengemis melalui pendidikan kecakapan hidup. Pemberdayaan yang di lakukan dengan memberikan pelatihan pertanian, menjait, pertukangan bangunan, pertukangan

kayu, keterampilan las. Hasil pemberdayaan ini warga binaan dikirim transmigrasi ke Kalimantan dan ditampung oleh perusahaan yang telah bekerja sama. Persamaan dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti yakni sama-sama membahas tentang program pemberdayaan gelandangan dan pengemis, namun untuk program yang diangkat menjadi pembahasan pada penelitian memiliki perbedaan, disertai lokasi atau tempat pada Dinas Sosial yang berbeda kota.

Andre Pane Sixwanda, dalam penelitian skripsinya yang berjudul “Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Sidoarjo (Studi Kasus di Liponsos Sidokare)”. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan tentang pemberdayaan tersebut. Fokus penelitian ini pada bimbingan keterampilan, bimbingan agama, bimbingan sosial, dan bimbingan fisik. Penelitian ini menunjukkan pemberdayaan gelandangan dan pengemis melalui bimbingan yang telah dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan gelandangan dan pengemis beserta keluarganya. Kesamaannya yakni sama-sama membahas program pemberdayaan gelandangan dan pengemis, serta tujuan penelitian ini membahas tentang bagaimana mengatasi masalah pemberdayaan gelandangan dan pengemis. Namun mengenai perbedaan, terdapat dari penggunaan teori yang digunakan serta pada tempat penelitian.

Lis Sudiandi dengan judul “Pemberdayaan (Gelandangan dan pengemis) Dalam Bidang Keterampilan Pengolahan Kedelai di Panti Sosial Bina Karya Penghudi Luhur Bekasi”. Penelitian ini berfokus pada pemberdayaan gelandangan dan pengemis dengan memberi keterampilan pengolahan kedelai. Dengan memberikan keterampilan pengolahan kedelai dapat merubah sikap atau

keinginan kerja keras agar tidak lagi mencari pekerjaan instan dengan menjadi gelandangan dan pengemis. Persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang program pemberdayaan gelandangan dan pengemis, serta dalam program pembinaan di panti, namun untuk perbedaannya yaitu dalam penggunaan teori dan fokus penelitiannya yang berbeda.

Rina Rohmaniyanti, dengan judul “Pemberdayaan Gelandangan dan pengemis Melalui Usaha Kegiatan Ekonomi Produktif di Lembaga Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta”. Usaha kegiatan produktif memberikan pelatihan keterampilan dan keuntungan dari hasil memperjual belikan ikan lele, warung, dan pertanian berupa buah-buahan, sayuran, serta tanaman obat-obatan.

**Tabel 2.1.**  
**Kajian Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan				
			Teori yang di gunakan	Pendekatan	Metode	Teknis Analisis	Hasil Penelitian
1	Ariya Akbariyah	Program Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis melalui Pendidikan Kecakapan Hidup di Panti Sosial Bina Karya Yogyakarta	Daryanto	Deskriptif Kualitatif	Metode Kualitatif	Dokumentasi, Wawancara, Observasi	Pemberdayaan warga binaan dikirim transmigrasi ke Kalimantan dan di tampung oleh perusahaan-perusahaan yang telah bekerjasama
2	Andre Pane Sixwanda	Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Sioarjo Studi kasus di Liposos Sidokare	Dubois dan Miley	Deskriptif Kualitatif	Metode kualitatif	Dokumentasi, Wawancara, Observasi	Pemberdayaan gelandangan dan pengemis melalui bimbingan yang telah dilakukan mampu meningkatkan kesejahteraan gelandangan dan pengemis beserta keluarganya yang telah keluar dari Liposos Sidokare

3	Lis Sudyanti	Pemberdayaan (Gelandangan dan Pengemis) Dalam Bidang Keterampilan Pengolahan Kedelai di Panti Sosial Bina Karya Panghudi Luhur Bekasi	Winarno	Deskriptif Kualitatif	Metode kuantitatif	Dokumentasi, Wawancara, Observasi	Keterampilan pengolahan kedelai dapat merubah sikap dengan mau belajar untuk bekerja keras tidak lagi bekerja instan dengan menjadi gelandangan dan pengemis
4	Rina Yohmayanti	Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis Melalui Kegiatan Ekonomi Produktif di Lembaga Sosial Hafana Daerah Istimewa Yogyakarta	Wibawa	Deskriptif kualitatif	Metode kualitatif	Dokumentasi, Wawancara, Observasi	Setelah mendapat pemberdayaan warga binaan memperjual belikan hasil dari perikanan berupa ikan lele, warung, dan pertanian berupa buah-buahan, sayuran, serta tanaman obat-obatan

Sumber: Hasil Pengolahan Peneliti, 2023

### **2.1.2 Administrasi Publik**

Administrasi sebagai ilmu pengetahuan adalah suatu fenomena yang baru, dimana ilmu tersebut muncul sebagai suatu cabang daripada ilmu-ilmu sosial yang lain dalam perkembangannya di Indonesia. Administrasi telah membawa prinsip-prinsip universal, dan pada prakteknya administrasi disertai dengan keadaan di Indonesia dengan tetap memperhatikan faktor-faktor internal maupun eksternal yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan ilmu administrasi.

Sebagai makhluk sosial manusia akan selalu membutuhkan pertolongan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhannya, oleh karena itu manusia perlu melakukan kerja sama untuk memenuhi kebutuhannya. Kerjasama merupakan serangkaian kegiatan oleh sekelompok orang yang dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan pembagian tugas sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengertian Administrasi menurut Sondang P. Siagian, 2004 yang dikutip dari buku Studi tentang Ilmu Administrasi yaitu administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerja sama demi tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya.

Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi sebagai sebuah proses kegiatan kerja sama yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati oleh bersama tidak lupa dengan pembagian kerja serta tugas dan pokok fungsinya masing-masing untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Ordway Tead (2004) administrasi adalah meliputi kegiatan individu-individu (eksekutif) dalam suatu organisasi yang bertugas mengatur, memajukan, dan menyediakan fasilitas usaha kerja sama sekelompok individu-individu untuk merealisasikan tujuan yang ditentukan. Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah serangkaian bentuk kerja sama secara individu maupun bersama-sama yang di bentuk untuk mengatur serta mengarahkan sekelompok individu di dalam sebuah organisasi untuk merealisasikan tujuan secara efektif dan efisien.

Leonard D. White dalam bukunya yang berjudul *Introduction to The Study of Public Administration* mengatakan *administration is a process common to all group effort, public or private, civil or military, large scale or small scale etc.* (Administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, negara, swasta, sipil, atau militer, usaha besar atau kecil, dan sebagainya).

Umumnya dalam proses administrasi memerlukan dua orang atau lebih dan juga kelompok yang terdiri dari kelompok-kelompok yang ada dalam suatu negara, yang bekerja di bidang swasta, serta bidang sipil atau bidang militer yang melakukan kerja sama dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan pengertian administrasi publik dalam bukunya William H. Newman yang berjudul *Administrative Action* mengemukakan bahwa *administration has been defined as the guidance, and leadership and control of the effort of a group of individuals towards some common goal.* (Administrasi

didefinisikan sebagai bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan dari usaha-usaha kelompok individu-individu guna tercapainya tujuan bersama).

Kedua definisi tersebut dijelaskan bahwa administrasi memerlukan sebuah tindakan berupa bimbingan, kepemimpinan, pengawasan yang efektif yang merupakan bagian dari fungsi-fungsi administrasi untuk mencapai suatu tujuan bersama yang telah ditentukan.

### **2.1.3 Kebijakan Publik**

Pada dasarnya banyak batasan atau definisi apa yang di maksud dengan kebijakan publik (*public policy*) dalam literatur ilmu politik. Definisi kebijakan publik yang di kemukakan oleh Thomas R. Dye menyakan bahwa :

“Kebijakan Publik adalah apapun juga yang di pilih pemerintah dengan cara mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan (mendingkan) sesuatu”.

Sementara itu, menurut William N Dun kebijakan publik merupakan pedoman yang berisi nilai dan norma yang mempunyai kewenangan untuk mendukung tindakan dalam wilayah yuridisknya. Berdasarkan definisi para ahli di atas maka dapat di kemukakan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang di lakukan oleh pemerintah ataupun pejabat pemerintah. Setiap kebijakan yang di buat oleh pemerintah pasti memiliki suatu tujuan, sehingga kebijakan publik berguna untuk memecahkan masalah yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan publik sangat di perlukan karena adanya tugas-tugas pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang harus merumuskan tindakan-tindakan untuk masyarakat.



Anggara (2014:35), istilah kebijakan publik terjemahan istilah Bahasa Inggris yaitu *public policy*, kata *public policy* diterjemahkan menjadi “Kebijakan”, sedangkan Said Abidin dikutip oleh Juwariyah (2021:69), menjelaskan bahwa kebijakan publik bukanlah suatu hal baru lalu terbatas, tetapi luas dan terletak pada lapisan-lapisan *esensial*. Dengan cara ini, kebijakan menjadi tolak ukur keseluruhan untuk strategi dan pilihan lain di bawahnya.

Menurut Carl Fredrich yang dikutip oleh Budi Winarno (2004:19), memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan sesuatu sasaran atau suatu dengan maksud tertentu.

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan atau suatu kebijakan yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh badan serta aktor pemerintah yang sesuai kewenangan dan kekuasaanya untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan melihan kondisi dalam rangka pemecahan suatu permasalahan.

### **2.1.3.1 Tahap Kebijakan Publik**

Tahap atau proses di dalam kebijakan publik merupakan suatu proses yang bersifat kompleks karena melibatkan beberapa proses yang harus di kaji. Wiliam N. Dun membagi tahap kebijakan menjadi beberapa tahap yaitu :

- 1) Tahap Penyusunan agenda

Sejumlah aktor yang di pilih dan di angkat untuk merumuskan suatu masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berpotensi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Karena tidak semua masalah menjadi sebuah prioritas dalam agenda kebijakan publik. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk Kepada agenda kebijakan para perumus kebijakan.

## 2) Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk kepada agenda kebijakan kemudian di bahas oleh para aktor pembuat kebijakan. Masalah tersebut kemudian didefinisikan untuk kemudian mencari solusi pemecahan masalah terbaik. Permasalahan tersebut berasal dari beberapa alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk kedalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan setiap alternatif bersaing untuk dapat di pilih sebagai tindakan yang di ambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan mengusulkan masalah tersebut.

## 3) Tahap Adopsi Kebijakan

Berbagai macam alternatif kebijakan yang di berikan oleh beberapa aktor perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif tersebut di adopsi atau di ambil untuk memberikan tindakan lebih lanjut dalam kebijakan publik dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsesus antara direktur lembaga atau kepuasan peradilan.

## 4) Tahap Impelementasi Kebijakan

Suatu program Kebijakan yang hanya akan menjadi catatan dan jika program tersebut tidak di implementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah di ambil sebagai alternatif pemecah masalah harus di impelemtasikan, yaitu di laksanakan oleh badan-badan pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah d ambil di laksanakan oleh badan-badan pemerintah yang memobiliasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini muncul berbagai kepentingan yang akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan dari pelaksana, namun ada juga yang di tentang oleh para pelaksana.

#### 5) Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap kebijakan yang telah di jalankan akan dinilai atau di evaluasi, hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang di buat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya di buat untuk meraih dampak yang di inginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang di hadapi masyarakat. Oleh karena itu, di tentukan ukuran-ukuran atau kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang di inginkan.

Dari uraian di atas mengenai tahapan pembuatan kebijakan publik, maka dapat di mengerti bahwa dalam perumusan masalah kebijakan publik tidaklah mudah. Mengingat banyaknya masalah-masalah yang ada dalam masyarakat tentu juga membutuhkan pemechan masalah yang tepat dan sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada. Oleh karena itu dalam menentukan kebijakan para aktor harus benar benar mengkaji dengan tepat sehingga tidak merugikan masyarakat.

#### **2.1.4 Evaluasi Kebijakan**

Didalam evaluasi kebijakan, Wayne Parsons menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan pemeriksaan yang objektif, sistematis dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap target dari segi tujuan yang diinginkan. Dalam melakukan evaluasi kebijakan, Wayne Parsons membagi tipe evaluasi kebijakan menjadi dua yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif merupakan evaluasi yang dilakukan ketika sebuah program kebijakan sedang di implementasikan dan juga kondisi yang bisa meningkatkan keberhasilan implementasi program tersebut.

Evaluasi ini untuk melihat atau memantau dimana sebuah program di kelola dan diatur untuk menghasilkan umpan balik yang berfungsi untuk meningkatkan proses implementasi. Dan evaluasi sumatif merupakan evaluasi yang mengukur bagaimana suatu kebijakan atau program secara aktual berdampak pada permasalahan yang di tangani. Membandingkan sebelum dan sesudah, membandingkan dampak masukan terhadap suatu kelompok dengan kelompok lain.

Menurut (Anderson: 2004) Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Menurut W. Dunn, istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi mencakup : kesimpulan, klarifikasi, kritik, penyesuaian dan perumusan masalah kembali. Evaluasi memiliki fungsi antara lain sebagai penyumbang alternatif kebijakan terbaru atau

revisi kebijakan dengan menggantikan kebijakan yang lama yang dianggap memunculkan suatu masalah di gantikan dengan kebijakan yang baru. Dengan demikian, evaluasi Kebijakan dapat meliputi perumusan suatu masalah kebijakan dan, mengusulkan program untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

Evaluasi biasanya ditunjukan untuk menilai sejauhmana keefektifan suatu kebijakan publik yang telah di tetapkan guna dapat dipertanggungjawabkan kepada konsituennya, dan dapat melihat sejauhmana tujuan yang dapat dicapai serta melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Menurut Anderson dalam Winarto (2008:166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi dan penilaian suatu kebijakan yang mencakup subtansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Hattry (1976:173), kegiatan evaluasi kebijakan adalah meliputi:

1. Menetapkan fokus dari evaluasi yang akan dilakukan
2. Menentukan data apa yang akan dihasilkan
3. Menetapkan perubahan-perubahan yang akan diukue
4. Mendisain evaluasi sehingga dapat merespons berbagai modifikasi program
5. Menggunakan multi metode dalam melakukan pengukuran

Dari beberapa kajian definisi menurut para ahli yang dikutip oleh peneliti, maka evaluasi kebijakan lebih bersifat fungsional karena dapat dilakukan pada setiap proses kebijakan, serta evaluasi kebijakan mengarahkan sebagai proses penilaian pencapaian kinerja dari implementasi.

### **2.1.5 Evaluasi Kebijakan Publik**

Evaluasi merupakan salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik, evaluasi ini ditunjukkan untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan publik, guna mempertanggungjawabkan kepada konsituensi. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan, menurut Khotimah dan Hertati (2021:32), evaluasi merupakan tahap penting bagi keseluruhan proses analisis kebijakan publik yang tidak hanya dilakukan pada tahap akhir, tetapi juga dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Evaluasi kebijakan digunakan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan publik.

Menurut Briant dan white dalam (Samodra Wibawa, 2004:63) evaluasi kebijakan pada dasarnya harus bisa menjelaskan sejauhmana kebijakan dan implementasinya mendekati tujuan. Pengertian evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Briant dan white diatas, mengarahkan penilaian evaluasi kebijakan dapat dilakukan pada tahap implementasi, dan implementasi dapat menilai sejauhmana dampak yang dihasilkan. Sementara itu menurut William N.Dun menjelaskan bahwa istilah evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran, pemberian angka, dan penilaian.

Evaluasi memberikan informasi yang benar dan dapat dipercaya mengenai suatu kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dicapai melalui tindakan publik, memberikan kritik dan saran terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan target, memberikan metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk juga perumusan permasalahan dan rekomendasi. Meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi

lebih berkenaan dengan kinerja kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan.

Menurut Rossi dan Freeman (dalam Samodra Wibawa, 2004:63), bahwa tujuan untuk mengevaluasi suatu program, peneliti harus menentukan nilai berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Dengan kata lain hal yang terpenting dalam membuat evaluasi adalah tersedianya tujuan. Tujuan merumuskan sasaran yang akan dicapai dalam suatu kebijakan, baik dinyatakan dalam suatu global maupun dalam angka-angka. Sedangkan kriteria memastikan bahwa tujuan ditetapkan sebelum itu dapat dicapai dan dipenuhi secara memuaskan. Didalam mendefinisikan tujuan-tujuan evaluasi yang berbeda-beda dapat dilihat bagaimana berjalannya suatu program yang dinilai gagal oleh suatu perangkat.

Dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan menurut peneliti yaitu, suatu kegiatan yang tidak hanya dilakukan didalam proses akhir tetapi dari awal penepatan suatu kebijakan ataupun secara keseluruhan didalam sebuah kebijakan. Evaluasi juga memberi informasi yang valid dan dapat di percaya mengenai kinerja suatu kebijakan, yaitu sejauhmana kebutuhan maupun nilai dan kesempatan yang telah dicapai melalui tindakan-tindakan publik.

#### **2.1.6 Evaluasi Program**

Secara spesifik evaluasi program berkaitan dengan informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan (Dunn, 2003), hasil kebijakan yang memberikan *output* dan *outcome*. Menurut Weis dalam (Anggara, 2014) analisis evaluasi bertujuan pada suatu pengukuran output dan outcome dari sebuah

program atau kebijakan dengan perbandingan pengukuran atas efesiensi, kejujuran pelaksanaan, dan berkaitan dengan standar-standar pelaksanaan.

Evaluasi memiliki beberapa fungsi utama dalam analisis kebijakan publik, pertama memberikan informasi valid berkenaan dengan kinerja kebijakan, sehingga dapat mengungkapkan seberapa jauh pencapaian tersebut. Evaluasi memiliki peran penting dalam memberikan *feedback* terkait apa yang terjadi dalam suatu program. Fungsi utama evaluasi memberikan informasi valid terkait kinerja suatu kebijakan, kedua memberikan kontribusi karifikasi dan kritikan pada nilai yang menjadi dasar pemilihan tujuan dan target, ketiga memberikan metode-metode analisis termasuk kepada hal perumusan masalah dan rekomendasi (Dunn, 2003).

Menurut Fink (2009:2) Program adalah sebuah usaha yang sistematis untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya. Arikunto (2009,9) Menjelaskan bahwa program merupakan sebuah sistem, dimana sistem ialah suatu kesatuan dari beberapa bagian atau komponen program yang saling berkaitan dan bekerja sama satu dengan lainnya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan satu sama lain dengan yang lainnya sehingga mencapai tujuan yang sudah di tetapkan.

Langbeing dan Felbinger (2006) menyatakan evaluasi program adalah metode penelitian ilmu sosial yang empiris hingga proses penjurian keefektifannya kebijakan publik, program atau implementasi dalam pengambilan keputusan, Menurut Strufflebean (1971), evaluasi prgram adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambilan keputusan, Tyler



(1950), mengemukakan bahwa, evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan telah teralisasi. Stufflebeam dalam Arikunto dan Jabar (2008) mengatakan bahwa evaluasi merupakan gambaran proses, mencari dan memberikan informasi yang berguna untuk para pengambil keputusan dalam alternatif keputusan

Nugroho (2010) menyatakan bahwa evaluasi bukanlah untuk menyelidiki, melainkan melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan suatu program, menjelaskan mengenai beberapa dimensi dalam melakukan evaluasi terhadap suatu program yaitu :

### **1. Efektifitas**

Pada dimensi ini digunakan untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program yang telah diterapkan telah berhasil mencapai target ataupun tujuan yang ingin tercapai. Indikator ini diukur melalui nilai produk atau nilai moneter. Apabila suatu kebijakan tidak mampu memecahkan suatu permasalahan pelaksanaan yang dihadapi maka kebijakan tersebut dapat dikatakan gagal. Dalam mengevaluasi program efektifitas ini dengan program mempertanyakan hasil yang diinginkan apakah sudah tercapai.

Didalam dimensi ini terdapat hubungan *output* dengan tujuan yang berarti semakin besar kontribusi atau *output* terhadap suatu pencapaian tujuan, maka semakin efektif program tersebut. Maka efektifitas suatu kebijakan atau program dapat diukur melalui standar terpenuhnya sasaran dan tujuan yang akan dicapai serta menunjukkan sejauh mana suatu organisasi melakukan program dan fungsinya secara optimal.

## **2. Efisiensi**

Pada dimensi ini untuk mencari tahu perbandingan antara *input*, *output*, dan *outcome* dari suatu kebijakan atau program. Indikator ini menekan pada usaha yang digunakan untuk menghasilkan tingkat efektivitas dengan memperhitungkan biaya per unit produk atau program. Apabila kebijakan atau program dengan menggunakan biaya terkecil maka kebijakan tersebut dapat dikatakan efisien. Dalam mengevaluasi dimensi efisiensi program dengan mempertanyakan bagaimana usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Mencakup biaya, manfaat, dan membandingkan biaya dengan manfaat.

## **3.. Kecukupan**

Pada dimensi ini melihat sejauh mana kebijakan atau suatu program dapat memecahkan suatu permasalahan secara singkat dan cepat melalui kebijakan atau program. Dimensi ini menekan pada hubungan antara kebijakan alternatif dan hasil yang di harapkan. Dalam mengevaluasi dimensi kecukupan program dengan mempertanyakan seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dalam memecahkan suatu masalah.

Kecukupan dalam hal ini ialah apabila suatu kebijakan atau program telah mencapai suatu tujuan dan mencukupi dalam berbagai hal. Dimensi ini berhubungan dengan efektifitas dengan melihat seberapa jauh alternatif yang ada dapat menentukan kebutuhan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

## **4. Perataan**

Pada dimensi ini mengetahui apakah biaya dan manfaat dari kebijakan atau program yang telah di terapkan terdistribusi secara merata kepada setiap

aktor atau kelompok yang terlibat. Dimensi ini berhubungan dengan usaha yang telah dilakukan oleh suatu kelompok yang berbeda dalam masyarakat untuk mendukung suatu program atau kebijakan. Dalam mengevaluasi dimensi pemerataan program dengan melihat apakah biaya dan manfaat sudah didistribusikan dengan merata kepada suatu kelompok atau masyarakat yang berbeda.

### **5. Responsivitas**

Pada dimensi ini menilai hasil dari kebijakan atau program yang diterapkan sudah sesuai dengan kebutuhan dan nilai dari suatu kelompok yang terlibat dalam kebijakan atau program tersebut. Dimensi ini mempertanyakan apakah efektifitas, efisiensi, kecukupan, dan pemerataan secara nyata mencerminkan kebutuhan, preferensi, dan nilai suatu kelompok tertentu.

### **6. Ketepatan**

Dimensi ini menilai apakah hasil atau tujuan dari kebijakan atau program yang diterapkan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Dimensi ini menekankan pada nilai dari tujuan program dan kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan kebijakan atau program. Dalam mengevaluasi dimensi ketepatan program dengan mempertanyakan apakah hasil dari tujuan kebijakan atau program telah dilaksanakan dengan baik dan benar.

#### **2.1.7 Pengertian Gelandangan**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis dalam pasal 1 ayat 1 “Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat

tinggal dan pekerjaan yang tetap diwilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum”

Gelandangan berasal dari kata gelandangan, yang artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat tinggal yang tetap, serta tidak mempunyai cara hidup tertentu yang berbeda dengan cara hidup masyarakat lainnya, dan gelandangan juga mengembara, atau berkeliaran, dan umumnya hidup sebatang kara.

### **2.1.8 Pengertian Pengemis**

Pengemis dapat di katakan orang-orang yang selalu meminta sedekah dan meminta dengan cara merendah-rendahkan dan dengan penuh harapan dan dapat dikatakan pengemis adalah orang yang meminta-minta. Pengemis digunakan untuk sebutan orang bagi orang yang membutuhkan makan, uang, tempat tinggal, atau hal lainnya dari orang yang ditemuinya dengan cara meminta. Berbagai atribut mereka gunakan, seperti pakaian compang-camping dan lusuh, topi, gelas plastik, atau bungkus permen, atau kotak kecil untuk menempatkan uang yang mereka dapatkan dari cara meminta-minta. Mereka menjadikan mengemis sebagai pekerjaan mereka dengan berbagai macam alasan, seperti kemiskinan dan ketidakberdayaan mereka karena lapangan kerja yang sempit.

Menurut Kementrian Sosial Republik Indonesia pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dari meminta-minta dimuka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 yang dimaksud pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara

meminta dimuka umum dengan alasan-alasan agar mendapatkan belas kasihan daro orang-orang.

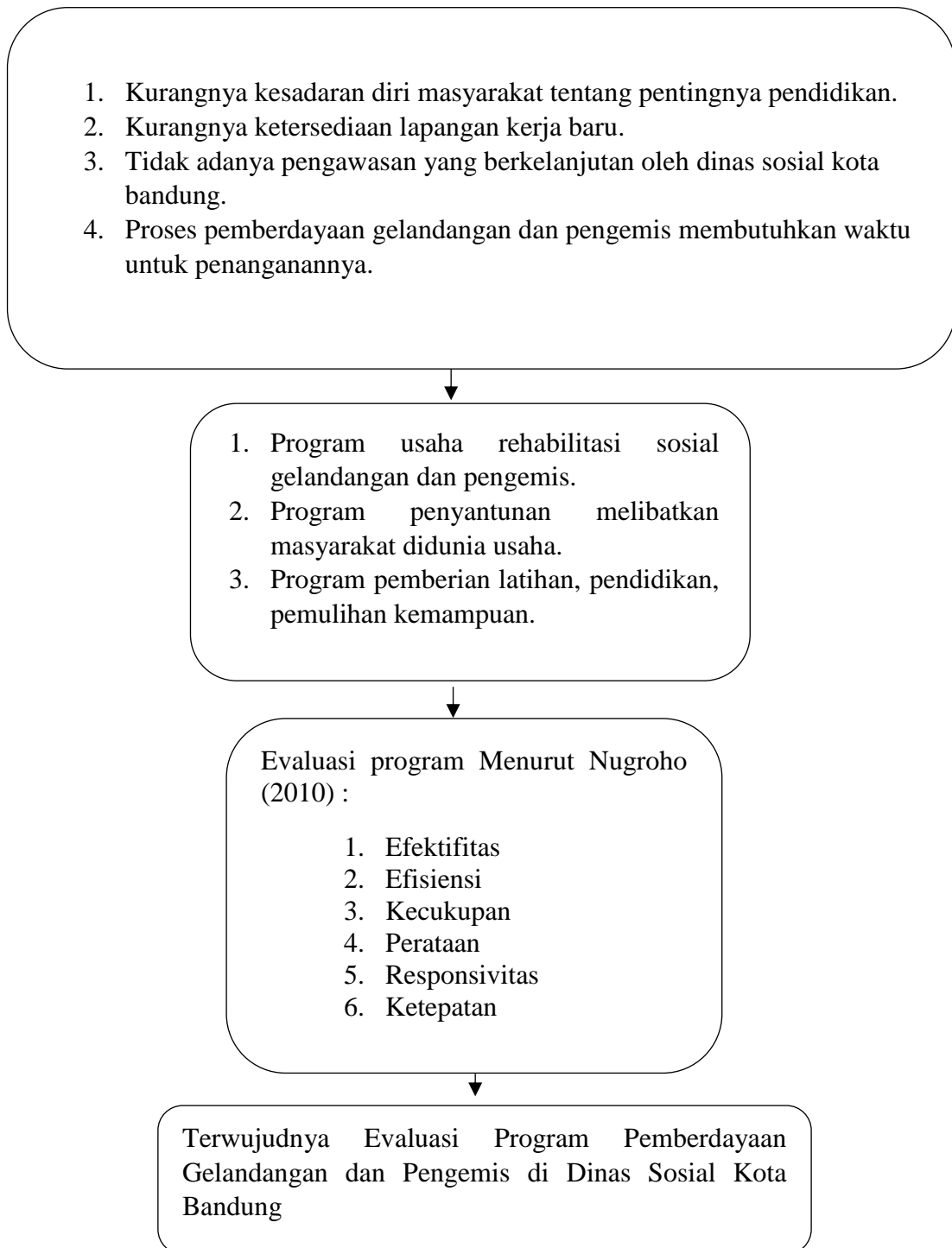
Pengemis adalah orang yang mendapat penghasilan dengan meminta dimuka umum, seharusnya pengemis adalah orang yang benar-benar dalam kesulitan dan mendesak karena tidak ada bantuan dari lingkungan sekitar dan dia tidak punya suatu keahlian yang memadai, bukan karena malas untuk mencari mata pencarian lainnya.

## **2.2 Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir atau pola pikir penulis dalam sebuah karya ilmiah yang disesuaikan dengan konsep, topik, dan didasarkan pada teori ahli sebagai acuan untuk menyelesaikan dan memahami beberapa variabel yang dapat penulis gunakan pada penelitian ini.

Sehubungan dengan judul Evaluasi Program Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial Kota Bandung guna mempermudah dalam menguraikan isu tersebut, maka diperlukan survey yang mendetail untuk mendukung keberhasilan Evaluasi Program Pemberdayaan Gelandangan dan Pengems di Dinas Sosial Kota Bandung demikian penulis menyelesaikannya dengan menerapkan teori yang diusulkan oleh (Nugroho, 2010) mengusulkan dalam rangka evaluasi , ada enam dimensi yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Efektifitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Perataan
5. Responsivitas
6. Ketepatan



**Gambar 2.2 Kerangka Berpikir**

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2023

### **2.3 Proposisi**

Atas dasar kajian berupa uraian konsep dan teori yang disajikan dalam kerangka pemikiran, maka peneliti menjelaskan Evaluasi Program Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial Kota Bandung sebagai berikut:

Keberhasilan dari pelaksanaan Evaluasi Program Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial Kota Bandung dapat terealisasi bilamana dalam pelaksanaannya dapat memperhatikan beberapa dimensi Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan.